

pasukan pemelihara perdamaian. Sebanyak sepuluh Negara menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB, Negara-negara tersebut akan bekerja selama dua tahun, yang dipilih secara bertahap yakni 5 negara setiap setahun sekalinnya. Dan Negara tersebut diatas akan bekerja mendampingi lima Negara anggota tetap DK, yakni *Inggris, Cina, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat*.¹

Kelima anggota tidak tetap DK PBB yang baru terpilih tahun ini, akan memulai masa tugas selama dua tahun mulai 1 Januari 2009 untuk menggantikan Indonesia, Afrika Selatan, Belgia, Italia dan Panama sampai dengan tahun 2010.

Bagi Negara-negara diseluruh dunia termasuk dalam keanggotaan 15 Negara di DK PBB itu akan membawa prestis dan otoritas Internasional, karena DK PBB merupakan badan politik tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Jepang yang selama ini memiliki keinginan besar menjadi anggota tetap namun tidak mendapat dukungan dari seluruh anggota tetap DK PBB terutama China sebagai anggota tetap yang memiliki hak veto, sehingga Jepang pada saat ini hanya mendapat dukungan menduduki kursi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.

Pada periode sebelumnya Asia diwakili oleh Indonesia yang berakhir tahun 2008 dan Vietnam sampai tahun 2009 di Dewan Keamanan PBB, namun tahun 2008 Jepang berhasil mendapatkan suara terbanyak dari kandidat lainnya seperti Iran. Dalam perebutan untuk kawasan Asia, Iran yang hanya meraih 32 suara, dikalahkan oleh Jepang yang memenangkannya, dengan memperoleh 158 suara.

¹ <http://www.kompas.com>”Jepang gantikan Indonesia di DK”, diakses pada tanggal 20 Maret 2009

Dengan demikian, Jepang menggantikan posisi Indonesia sebagai wakil Asia. Keberhasilan Jepang menjadi anggota tidak tetap DK PBB sudah yang kesepuluh kalinya diantaranya pada tahun: 1958-1959, 1966-1967, 1971-1972, 1975-1976, 1981-1982, 1987-1988, 1992-1993, 1997-1998, 2005-2006, **2009-2010.**²

Keberhasilan Jepang meyakinkan Negara-negara anggota PBB agar memberikan dukungan suaranya pada voting yang dilakukan dalam Sidang Umum PBB dan memilih Jepang sebagai anggota tidak tetap DK periode 2009-2010 sudah terbukti, di mana Jepang terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Ada berbagai kendala yang dihadapi Jepang untuk menempuh kursi keanggotaan tidak tetap DK PBB 2009-2010, diantaranya:

pertama Kehawatiran Cina. Hal ini dilatar belakangi pada tahun terakhir Jepang menjadi anggota tidak tetap DK (2005-2006), kemudian Jepang berkeinginan untuk menjadi anggota tetap DK tahun 2006, namun ditolak Cina dengan vetonya. Dengan sangat tegas Cina mengancam sekaligus menolak pencalonan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Cina menganggap bahwa langkah Jepang tersebut merupakan suatu keinginan yang berbahaya bagi jalannya reformasi dewan keamanan tersebut.

Dari pencalonannya menjadi anggota tetap DK inilah, muncul ketakutan apabila Jepang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, itu berarti

² http://www.un.org/sc/list_eng5.asp

Jepang akan mengembangkan kekuatan militernya dalam rangka membantu menjaga perdamaian dan stabilitas dunia serta menjadikan langkah ini sebagai awal dari upaya memunculkan kembali reformasi di Dewan Keamanan PBB, yakni dengan penambahan anggotanya. Sehingga, apabila Jepang dapat meyakinkan wacana tersebut kepada Negara-negara di dunia, tidak menutup kemungkinan Jepang yang notabnya sebagai kandidat Negara terkuat anggota tidak tetap Dewan Keamanan dapat terpilih sebagai anggota tetap. Maka dari hal tersebutlah muncul kekhawatiran China apabila Jepang menjadi anggota tidak tetap DK.

Pengalaman Cina yang mempunyai sejarah buruk atas pelanggaran HAM oleh Jepang, menganggap keinginan Jepang ini menimbulkan trauma masa lalu, yangmana dengan kekuatan militer yang besar, peristiwa di masa lalu dapat terjadi kembali.

Kedua, Penentangan Korea Utara. Pihak Korut mengatakan bahwa Jepang pernah melakukan kejahatan kemanusiaan, melaksanakan politik kebangkitan militerisme serta menjadi ancaman bagi negara tetangga, kesemua tindakan Jepang itu telah melanggar asas tujuan PBB. Mengingat Jepang tidak mawas diri, dan juga tidak mengadakan kompensasi apapun, bahkan mengancam negara tetangga di Asia Timur Laut.

Jepang seharusnya tidak boleh menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Korea Utara menentang keras konsep apapun perluasan Dewan Keamanan yang menyangkut Jepang. Ini menjadi ketakutan tersendiri yang dirasakan Korut, sebagaimana kita ketahui sikap agresif Jepang pada masa

sebelum perang Dunia kedua yang melakukan pelanggaran HAM ke berbagai negara.

Ketiga, Konstitusi 1947 pasal 9. Seperti yang telah dijelaskan diawal Latar belakang masalah, bahwa Dewan Keamanan PBB merupakan lembaga penjaga perdamaian dunia yang berkewajiban melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dunia agar tetap tertib, aman dan damai. Perananannya juga dapat dalam bentuk pemulihan keadaan pasca konflik atau perang yang melanda suatu Negara.

Dengan demikian, hal tersebut identik dengan kekuatan militer yang akan dioptimalkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan dari DK PBB yang tersebut diatas. Yang menjadi hambatan bagi Jepang untuk menjadi anggota Dewan Keamanan yakni konstitusi 1947 pasal 9, dimana konstitusi tersebut melarang Jepang memiliki angkatan perang dan militer. Sehingga banyak pihak yang mengatakan akan lebih baik jika Jepang lebih memfokuskan pada bidang ekonomi saja.

Bunyi pasal 9 konstitusi 1947 yakni bangsa dan Negara Jepang dengan tulus ikhlas berharap serta bercita-cita menegakan perdamaian dan ketentraman dunia. Dan Jepang sebagai sebagai suatu Negara bangsa, berhak dan berdaulat menyatakan diri membuang jauh-jauh untuk selama-lamanya penggunaan kekuatan bersenjata serta menolak perang sebagai satu-satunya cara bagi Jepang untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan yang terjadi di atas muka bumi ini.³

³ <http://www.myrmnews.com>“Persepsi terhadap Konstitusi Jepang 1947 pasal 9”

Keempat, Bersaing dengan Iran. Untuk menggantikan Indonesia di keanggotaan tidak tetap DK PBB, Jepang bersaing memperebutkannya dengan Iran. Secara pengalaman Iran memang kalah jauh dari pada Jepang, yang mana Iran hanya pernah satu kali menjadi anggota tidak tetap DK pada tahun 1955-1956, berbeda dengan Jepang yang sudah Sembilan kali duduk di kursi DK seperti yang disebutkan diatas. Bukan hanya itu saja, Jepang juga mempunyai poin-poin lainnya seperti sebagai penyumbang dana terbesar kedua untuk PBB. Sedangkan Iran memiliki kendala dengan sanksi yang diterima dari resolusi DK karena anggapan bahwa Iran mengembangkan nuklir untuk senjata.⁴

Dari keterangan tersebut, tidak berarti Iran tidak mempunyai peluang untuk memenangkan voting menjadi anggota tidak tetap, melainkan kekurangan dan penghambat yang Iran miliki dapat menjadi kekuatannya, karena hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara-negara anggota PBB khususnya DK agar Iran dapat bekerjasama mengenai proliferasi nuklirnya dengan cara memasukan Iran kedalam keanggotaan tidak tetap DK. Sehingga jelas peluang Iran tidak kalah besar dengan Jepang.

B. Pokok Permasalahan

Mengapa Jepang dapat terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode Januari 2009 - Desember 2010?

⁴http://www.republika.co.id/berita/8032/Iran_dan_Jepang_Bersaing_Keras_Gantikan_Indonesia_d_i_DK_PBB

C. Kerangka Dasar Teori

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam suatu penelitian, biasanya diperlukan adanya suatu bentuk teoritis yang dapat menjembatani pokok permasalahan kepada hipotesa yang telah dirumuskan.

Sebagai landasan teori dan kerangka berpikir dalam penulisan ini maka penulis menggunakan teori diplomasi, politik luar negeri dan Konsep Kerjasama dan Organisasi Internasional, karena teori dan konsep ini memiliki dasar pemikiran yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada.

1. Diplomasi

Definisi diplomasi dalam *Oxford English Dictionary* menyebutkan: “*The management of international relations by negotiation.*” *The method by which these relations are adjusted and managed.*”

Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to diplomatic practice* mengatakan diplomasi adalah “*The application of intelligence and tact to conduct of official relations between the governments of independent states.*” (penerapan kepandaian dan taktik pada hubungan resmi antara pemerintah Negara-negara berdaulat).

Pengertian diplomasi berhubungan erat dengan politik luar negeri, yakni penetapan tujuan dan sasaran, sementara diplomasi mencakup sarana mekanisme untuk mencapai sasaran dan tujuan dari politik luar negeri. Diplomasi merupakan instrument penting dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam banyak hal diplomasi dapat digambarkan hubungan antar Negara, memberikan suatu peranan yang besar dalam

pemeliharaan perdamaian dengan mengedepankan seni negosiasi, pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional.

Kisinger menunjukkan bahwa diplomasi berperan penting dalam penyesuaian perbedaan-perbedaan antara bangsa-bangsa. Dengan menekankan pada empat tujuan utama diplomasi yaitu *Acquisition* (perolehan), *Preservation* (pemeliharaan), *Augmentation* (penambahan) dan *Proper Distribution* (pembagian yang adil).

Tujuan diplomasi meliputi keseluruhan bagian dari politik luar negeri: diplomasi dengan menetapkan tujuan-tujuan berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya, diplomasi bernilai tujuan-tujuan Negara lain, diplomasi menetapkan seberapa jauh tujuannya, diplomasi menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuannya.

Menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan salah satu bagian dari kepentingan nasional Jepang saat ini untuk melangkah kedepan, agar dapat memainkan peranan militernya lebih jauh dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dan *prestige* di masyarakat internasional. Untuk itu mekanisme yang digunakan untuk mencapai dan mengimplementasikan tujuan tersebut adalah dengan menggunakan sarana diplomasi.

Jepang tergabung dan berperan penting dalam beberapa kelompok Negara dan organisasi yang sebagian besar dari seluruh organisasi tersebut adalah anggota PBB. Dengan demikian mudah untuk Jepang melakukan diplomasi terhadap Negara anggota PBB melalui organisasi-organisasi tersebut untuk

mencapai kepentingan nasionalnya duduk pada kursi keanggotaan tidak tetap DK PBB 2009-2010.

2. Politik Luar Negeri

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri di artikan sebagai berikut:

*Foreign Policy is strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or internastional entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest.*⁵

Dari definisi diatas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat kebijakan, antara suatu Negara terhadap Negara lain atau lembaga internasional yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap, cara pandang dan cara memposisikan suatu negara.

3. Kerjasama dan Organisasi Internasional

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa terlepas dari hubungan antara yang satu dengan lainnya, hubungan inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi tersebut merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antara orang-perorangan, kelompok manusia, maupun antara kombinasi diantara keduanya. Bentuk interaksi ini dapat disebut juga sebagai Hubungan Internasional. Yakni secara umum Hubungan Internasional adalah Interaksi antar aktor-aktor politik Internasional yang melampaui batas-batas yuridiksi suatu negara, dimana negara merupakan unit politik yang didefinisikan menurut

⁵ Jack. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1969, p.127

teritorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan hegemonitas etnisnya.⁶

Interaksi tersebut diatas dilakukan oleh negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, yang mengacu pada pendapat J. Frankel mengenai negara, yaitu negara merupakan bentuk tertinggi dari organisasi manusia.⁷ Sehingga negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan. Namun sejalan dengan perkembangan dalam dunia Internasional menyebabkan negara bukan lagi aktor dominan, melainkan muncul aktor-aktor lain yang tidak kalah penting seperti organisasi Internasional, kelompok perorangan atau bahkan individu yang berpengaruh, yang kemudian mengadakan berbagai rangkaian aksi dan reaksi yang membentuk apa yang disebut Hubungan Internasional.

Organisasi Internasional yang keberadaannya sekarang semakin banyak, baik yang beranggotakan pemerintah atau non pemerintah, dapat didefinisikan sebagai:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara yang didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melakukan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah antara negara yang berbeda.”

⁶ Theodore A. Coulombis & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung, Abardin, 1990, hlm. 5.

⁷ J. Frankel, alih bahasa oleh Dra. Leila H. Hasyim, *International Relation*, Jakarta, ANS Sungguh Bersaudara, 1980, hlm. 99.

Setiap Organisasi Internasional dibentuk dalam rangka mencapai semua atau beberapa tujuan berikut:⁸

1. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar Negara secara damai.
2. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan konflik atau perang Internasional.
3. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antara Negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi di kawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
4. Pertahanan kolektif sekelompok Negara untuk menghadapi ancaman eksternal.

Peranan Organisasi Internasional dapat dibagi menjadi 3, yaitu:⁹

1. Instrumen, Organisasi Internasional umumnya dipahami sebagai alat Negara untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.
2. Arena, Organisasi Internasional berperan sebagai wadah atau forum yang melahirkan tindakan-tindakan.
3. Aktor, Organisasi Internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh aktor-aktor lain (Negara).

Menurut Friedrich Kratochwil dan John Gerard Ruggie, peranan organisasi Internasional adalah:¹⁰

⁸ Theodore A. Coulombis & James Wolfe, *Op. Cit.* hal. 279.

⁹ Clive Acher, *International Organization: The Yearbook of International Organization*, University of Aberdeen, 1983, hlm. 130-152.

¹⁰ Friedrich Kratochwil & Edward D, *International Organization: A Reader*. Peesylvania, New York, Harper Collin Publisher, 1994, hal. 6.

- 1. The emphasis was on the role of International Organization in the resolution of substantive international problem.*
- 2. Focus away from the solution of substantive problems through perse, toward certain long-term institutional consequences of the failure to solve substantive problems through the available institutional means.*
- 3. Critique of the transformational expectations of integration theory and then shifted the focus on to a more general concern with how international institutions reflect and to some extent magnify or modify the characteristic feature of international system.*

Setelah melihat tujuan dan fungsi kerjasama serta konsep Organisasi Internasional diatas, maka keberhasilan Jepang sehingga dapat terpilih sebagai salah satu anggota tidak tetap DK PBB untuk periode Januari 2009-Desember 2010, karena Jepang melakukan pendekatan melalui kerjasama-kerjasama Internasional dan berperan aktif dalam beberapa Organisasi Internasional serta adanya dukungan dari sebagian besar anggota tetap DK. Yang mana Negara yang terhimpun dalam Organisasi PBB yang dapat secara langsung mendukung Jepang dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan di Majelis Umum PBB.

Jepang menjadikan Organisasi-organisasi tersebut diatas sebaagai alat atau waadah untuk mencapai kepentingan nasionalnya menjadi anggota tidak tetap DK dengan cara melakukan kerjasama-kerjasama pada organisasi regional dan Internasionla seperti ASEAN +3, APEC, G20, G7 dll.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang ada dalam menjawab permasalahan ini, penulis menarik hipotesa :

Terpilihnya Jepang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode Januari 2009-Desember 2010 yang dipilih oleh Majelis Umum PBB, didasarkan pada ; “Kebijakan-kebijakan Jepang yang kooperatif dan aktif dalam Organisasi Internasional terutama dalam misi-misi pemeliharaan dan penjagaan perdamaian PBB serta besarnya kontribusi dana oleh Jepang untuk PBB, sehingga negara-negara anggota PBB mendukung terpilihnya Jepang menjadi anggota tidak tetap DK.”

E. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan :

1. Mempelajari lebih dalam tentang faktor pendukung terpilihnya Jepang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
2. Memperlajari dan menjelaskan aktor dan perilaku Internasional yang ada dalam Hubungan Internasional dengan ilmu dan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, dalam rangka pengembangan wawasan dan intelektual penulis.
3. Untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Dengan demikian, pembahasan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan menjadi kurang terfokus, rancu dan kurang ilmiah tentunya.

Untuk itu jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada topik yang diangkat oleh penulis, yaitu dari tahun 2006 (periode 2005-2006), dimana saat itu periode terakhir Jepang menjadi anggota tidak tetap DK PBB, sampai sekarang periode 2009-2010 dimana Jepang terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB menggantikan Indonesia.

G. Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran atau teori, kemudian ditarik kesimpulan suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atas berbagai buku, jurnal ilmiah, surat kabar, kliping, internet, maupun catatan dan dokumentasi lainnya yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan ke dalam sub-sub bab. Sistematika penulisan tersebut, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Jangkauan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas tentang faktor yang menggambarkan tentang upaya Jepang menjadi negara normal (*normal state*), dimana hal tersebut erat kaitannya untuk menggambarkan kondisi Jepang dari berbagai sisi dan sudut pandang.

BAB III Membahas struktur Dewan Keamanan PBB secara keseluruhan, yang menjelaskan tentang siapa itu DK PBB, serta gambaran keanggotaan didalamnya serta tugas dan fungsinya.

BAB IV Mengungkapkan tentang kerjasama dan peran aktif Jepang dalam organisasi regional dan internasional, dan faktor-faktor pendukung Jepang menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

BAB V Kesimpulan. Pada bagian ini berisikan rangkuman dari bab-bab sebelumnya, juga merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini.